

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2015, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muladi dan Nawawi Arif, 2005, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Narbuko, Cholid, 2013, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2003, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta.
- Sahetapy, J., 2007, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sasongko, Hari dan Lili Rosita, 2013, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Simanjuntak, Osman, 2009, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Siregar, Gomgom T.P., 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.

Sofyan, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Rangkang Education*, Yogyakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Waluyo, Bambang, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Rangkang Education*, Yogyakarta.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **C. Jurnal**

Empiyana, Desika Ria Raun, 2020, *Proses Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/PEKAN/01/2019)*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Kristiani, N.M., 2014, *Kejahatan Kekerasan seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Universitas Udayana, Denpasar Bali.



#### **D. Internet**

Puksinas Bareskrim Polri, 2022, *Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan*  
[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kekerasan\\_seksual\\_mendominasi\\_kasus\\_kejahatan\\_pada\\_anak](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak), diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 16.00 wib.

Setiawan, Ebta, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 15 November 2022.

